

# Internet, Ketimpangan Digital dan Kebijakan Inklusif

Muhammad Husni Arifin

Program Studi Sosiologi  
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)  
Universitas Terbuka

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimulai di era 90-an telah mengubah konstruksi tatanan sosial lama menjadi tatanan sosial baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi informasi (Ferro, Dwivedi, Gil-Garcia, & Williams, 2010). Manuel Castells (1996) menyebut tatanan sosial baru dengan istilah “network society” di mana fungsi dan sistem masyarakat lebih banyak diatur dalam struktur jejaring (*network*) daripada struktur fisik. Tatanan sosial baru yang berbasis teknologi ini merupakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya atau yang disebut dengan *cyberspace*. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi telah memicu suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya berdasarkan relasi-relasi alamiah berubah berdasarkan cara baru yang sebagian besar bersifat artifisial (Piliang, 2012).

Perkembangan pesat TIK ini setidaknya juga telah menghidupkan harapan baru, terutama bagi kelompok ekonom Neoklasik, bahwa efek dari inovasi teknologi dan kekuatan pasar akan mampu menghapus ketimpangan dalam masyarakat. Jalinan antara TIK dan aktivitas sehari-hari juga semakin tidak bisa dipisahkan, seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan, belanja, distribusi barang dan jasa, komunikasi antar individu, dan berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, para pembuat kebijakan (*policy makers*) di hampir seluruh dunia juga berbondong-bondong untuk menerapkan *e-governance* dalam sistem pemerintahan mereka.

Meskipun demikian, hubungan antara relasi sosial dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selain dapat memberdayakan individu atau kelompok sosial juga memiliki sisi lain yang dapat mengakibatkan fragmentasi, marginalisasi dan ketidakberdayaan. Fenomena semacam ini dinamakan dengan ketimpangan digital (*digital divide*). Ketimpangan digital

ini juga digunakan untuk membedakan antara individu yang kaya terhadap informasi (*information rich*) dan individu yang miskin informasi (*information poor*) atau tidak memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (Bagchi, 2005; Chinn & Fairlie, 2007). Ketimpangan digital tidak bisa dianalisis dalam sebuah “ruang hampa” tanpa mengaitkan dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat. Sebagaimana Manuel Castells (2006) mengatakan bahwa untuk memahami kondisi-kondisi baru yang muncul sebagai akibat penetrasi teknologi digital kita harus memahami kelompok-kelompok strategis yang berkuasa dan relasi-relasi kuasa yang terbentuk dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjelaskan ketimpangan digital dalam perspektif sosiologi dimana ketimpangan digital harus dikaitkan dengan konteks sosial, politik, kultural, dan ekonomi suatu masyarakat.

### **Teori Normalisasi dan Difusi (Normalization and Diffusion Theories)**

Penggunaan dan masa depan internet di masyarakat telah memunculkan perdebatan di kalangan pakar ilmuwan sosial dan teknologi informasi dan komunikasi. Setidaknya ada dua teori utama yang dapat menjelaskan masa depan pemanfaatan internet dan ketimpangan digital dalam masyarakat, yakni teori normalisasi dan teori difusi.

**Teori Normalisasi.** Teori normalisasi dapat dikatakan sebagai teori berperspektif optimis (*cyber optimists*) di mana teori ini memprediksi internet selalu berdampak positif dan dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat. Tokoh utama yang mewakili teori normalisasi adalah Resnick D (1998). Menurut Resnick (1998), perbedaan tingkat antara pemilik akses internet dan yang tidak memiliki akses akan semakin menurun, setidaknya dalam masyarakat pos industri. Ekspektasi ini didasarkan pada fenomena semakin luasnya pemanfaatan internet, baik sebagai pusat layanan publik atau komersial. Semakin populernya internet sebagai media interaksi dan bisnis akan memunculkan pasar terbuka (*open market*) yang pada gilirannya mengatasi masalah ketimpangan digital tanpa perlu meminta bantuan kepada pemerintah. Pasar terbuka ini akan meningkatkan kompetisi dan akan menurunkan biaya-biaya layanan internet dan alat-alat komputer. Dengan begitu, di bawah perspektif “normalisasi”, penyebaran internet akan semakin meningkat di masing-masing negara sampai dengan 90 – 95% dari seluruh populasi pengguna internet.

**Teori Difusi.** Berbeda dengan teori normalisasi, teori difusi meramalkan terhadap meningkatnya penyebaran ketimpangan digital di dunia. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Everett Rogers (1996). Rogers (1996) mengemukakan bahwa teori difusi bersumber dari analisis terhadap beberapa studi kasus tentang pengenalan beberapa teknologi sebelumnya, misalnya pengenalan teknologi televisi sebagai media massa, mesin uap sebagai teknologi produktif, dan bubuk mesiu dalam strategi militer. Terhadap semua kasus tersebut, pengenalan suatu teknologi baru memerlukan jaminan bahwa adopsi teknologi akan berhasil dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengenalan suatu teknologi baru memerlukan keterlibatan sekelompok sosial kecil yang dianggap mampu mengadopsi teknologi tersebut karena dianggap memiliki kesanggupan finansial dan intelektual (pengetahuan). Upaya untuk melibatkan kelompok sosial elit ini tentu akan menambah ongkos produksi dan ini merupakan suatu resiko untuk memunculkan inovasi teknologi. Dengan model semacam ini, penyebaran teknologi informasi dan komunikasi akan mengikuti model kurva S di mana pada bagian bawah kiri dari kurva adalah kelompok sosial yang selalu tertinggal dalam mengadopsi teknologi baru sehingga tidak dapat memaksimalkan fungsi teknologi internet untuk kepentingan sosial dan ekonomi mereka. Sementara itu, pada bagian atas kanan dari kurva adalah kelompok sosial elit memiliki tingkat pendidikan dan status sosial yang lebih tinggi. Dengan begitu, mereka dapat mengadopsi suatu teknologi baru lebih cepat dan mampu memaksimalkan manfaat internet bagi kepentingan mereka. Kondisi ini pada akhirnya terus memunculkan gap antara kelompok sosial bawah dan elit. Gap semacam ini berpotensi menciptakan stratifikasi dalam penggunaan internet (Chadwick, 2006).

### **Ketimpangan Digital sebagai Masalah Sosial**

Pemanfaatan internet oleh masyarakat di negara-negara Asia terus berkembang pesat. Sebagai contoh, data pengguna internet di Indonesia terus meningkat pesat per tahun. Pada tahun 2014 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 83,7 juta dan menempatkan Indonesia sebagai pengguna internet ke-6 terbesar di Dunia. Namun pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat drastis menjadi 132,700,000 dan menempatkan posisi Indonesia naik menjadi peringkat ke-5 (tabel 1).

Mencermati begitu massifnya pengguna internet di dunia maka dapat dikatakan bahwa TIK sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. TIK telah memiliki peran inklusif mulai dari peran dalam lingkup personal sampai dengan peran makro di level masyarakat, seperti e-governance (Selwyn & Facer, 2010).

Tabel 1. Kelompok 20 Negara dengan Pengguna Internet Tertinggi

No	Country or Region	Population, 2017 Est.	Internet Users 30 June 2017	Internet Penetration	Growth (*) 2000 - 2017
1	<u>China</u>	1,388,232,693	738,539,792	53.2 %	3,182.4 %
2	<u>India</u>	1,342,512,706	462,124,989	34.4 %	9,142.5 %
3	<u>United States</u>	326,474,013	286,942,362	87.9 %	200.9 %
4	<u>Brazil</u>	211,243,220	139,111,185	65.9 %	2,682.2 %
5	<u>Indonesia</u>	263,510,146	132,700,000	50.4 %	6,535.0 %
6	<u>Japan</u>	126,045,211	118,453,595	94.0 %	151.6 %
7	<u>Russia</u>	143,375,006	109,552,842	76.4 %	3,434.0 %
8	<u>Nigeria</u>	191,835,936	91,598,757	47.7 %	45,699.4 %
9	<u>Mexico</u>	130,222,815	85,000,000	65.3 %	3,033.8 %
10	<u>Bangladesh</u>	164,827,718	73,347,000	44.5 %	73,247.0 %
11	<u>Germany</u>	80,636,124	72,290,285	89.6 %	201.2 %
12	<u>Vietnam</u>	95,414,640	64,000,000	67.1 %	31,900.0 %
13	<u>United Kingdom</u>	65,511,098	62,091,419	94.8 %	303.2 %
14	<u>Philippines</u>	103,796,832	57,607,242	55.5 %	2,780.4 %
15	<u>Thailand</u>	68,297,547	57,000,000	83.5 %	2,378.3 %
16	<u>Iran</u>	80,945,718	56,700,000	70.0 %	22,580.0 %
17	<u>France</u>	64,938,716	56,367,330	86.8 %	563.1 %
18	<u>Turkey</u>	80,417,526	56,000,000	69.6 %	2,700.0 %
19	<u>Italy</u>	59,797,978	51,836,798	86.7 %	292.7 %

20	<u>Korea, South</u>	50,704,971	47,013,649	92.7 %	146.9 %
TOP 20 Countries		5,038,740,614	2,818,277,245	55.9 %	944.1 %
Rest of the World		2,480,288,356	1,067,290,374	43.0 %	1,072.2 %
<u>Total World Users</u>		7,519,028,970	3,885,567,619	51.7 %	976.4 %

Sumber: <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari persentase penetrasi internet maka Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara-negara yang memiliki gap yang besar antara penduduk yang memiliki akses terhadap internet dan mereka yang tidak memiliki akses (Tabel 2). Di berbagai distrik di negara-negara berkembang, penetrasi teknologi ternyata tidak berjalan secara merata. Penetrasi teknologi sebagian besar terjadi di wilayah-wilayah perkotaan atau sub-urban dan meninggalkan banyak wilayah terpencil dengan fenomena ketimpangan digital.

Munculnya ketimpangan digital sesungguhnya tidak bisa dilihat sebagai suatu fenomena tersendiri namun harus dianalisis terkait dengan konteks sosial, kultural, dan ekonomi pada masyarakat tersebut. Suatu studi tentang ketimpangan digital menemukan fakta bahwa ketimpangan digital dipengaruhi oleh jender, umur, gaji, ras, latarbelakang pendidikan, geografi, dan disabilitas (Selwyn & Facer, 2010).

Studi yang dilakukan oleh Lianzhin Yu (2006) menjelaskan beberapa prediktor ketimpangan digital yang dirangkum melalui tabel 2. Studi ini menunjukkan bahwa suatu ketimpangan digital harus dilihat secara lebih luas dan mendalam dalam konteks ketimpangan dan ketidakadilan sosial (*social inequalities and injustice*) dalam suatu masyarakat.

Tabel 2. Prediktor Ketimpangan Digital

Age	Increased age associated with decreased levels of access, limited modes of use and patterns of connecting. Age differences are especially pronounced in those individuals aged 60 years and over.
Culture/Social participation	Communities and individuals with higher levels of social contacts tend to make more use of ICTs.
Education	Lower levels of education are also shown to be

	associated with digital divides concerning access to and use of a range of ICTs.
Family structure	Family composition, adult caring responsibilities (i.e. for an older parent) tend to be associated with less contact with ICT. Conversely, the presence of school-age children within the household tend to increase contact with ICT.
Gender	Whilst gender differences were associated with digital divides during the 1990s, more recent academic research seems to indicate declining gender differences in ICT access and basic levels of engagement.
Geography/ rural-urban location	Levels of ICT use generally less in rural and inner-city areas, although often differences are not evident once other socio-economic variables are taken into account.
Income/ socio- economic status	Lower levels of income are consistently shown to be associated with digital divides concerning access to and use of a range of ICTs.
Race	Some US studies report lower levels of access and use amongst African-American and Latino populations. However, many studies report that then racial differences in ICT use disappear when issues of income and education are taken into consideration.

Sumber: Yu, L. (2006).

Fenomena ketimpangan digital, terutama di negara-negara berkembang, dianggap oleh sebagian ilmuwan dari kelompok *cyber-pessimists* dapat menjadi faktor yang semakin meningkatkan ketimpangan ekonomi dan proses marginalisasi terhadap kelompok non-digital (Castells, 1996). Oleh karena itu, ketimpangan digital sangat terkait erat dengan ketimpangan ekonomi. Efek yang dibawa oleh perkembangan internet dianggap oleh kelompok *cyber-pessimists* ternyata semakin meningkatkan ketimpangan ekonomi di seluruh dunia karena selama ini internet hanya berfungsi maksimal dalam menciptakan berbagai sumber daya baru di negara-negara kaya (Franda, 2002).

Pendapat dari kelompok *cyber-pessimists* ini dibantah oleh studi-studi yang dilakukan oleh kelompok *cyber-optimists* bahwa munculnya internet

telah memberikan dampak positif bagi negara-negara miskin, khususnya di bidang ekonomi, misalnya teknologi internet telah banyak membantu menciptakan koneksi antara pedagang lokal dan para pembeli di seluruh dunia. Internet bisa dikatakan merupakan instrumen vital untuk mendukung produk-produk lokal dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital telah membantu untuk menghapus hambatan-hambatan dalam era industri dan mempromosikan berbagai bentuk industri jasa (Parthasarathy, 2005). Meskipun demikian, aspek yang perlu dijelaskan oleh kelompok ini adalah bagaimana menjelaskan data tentang ketimpangan digital yang masih muncul sampai saat ini meskipun teknologi internet telah dikenal luas sejak tahun 1990-an.

Beberapa studi menemukan fakta bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan digital pada suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Hargittai (1999) menemukan fakta bahwa tingkat ekonomi suatu negara yang diukur melalui GNP merupakan faktor utama yang mempengaruhi munculnya ketimpangan digital. Studi-studi lainnya juga menemukan fakta yang serupa bahwa perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap kemunculan ketimpangan digital (ITU, 1999; Rodrigues & Wilson, 2000). Selain faktor sosial ekonomi, studi yang dilakukan oleh Norris (2001) menemukan faktor lainnya, yaitu tingkat investasi di bidang teknologi dan pengetahuan atau pendidikan. Semakin tinggi tingkat investasi dalam dua bidang tersebut maka semakin rendah tingkat ketimpangan digital dalam negara tersebut. Investasi di bidang pendidikan terkait erat dengan tingkat pengembangan modal manusia (*human capital development*) yang menjadi prasyarat utama terbentuknya masyarakat informasi. Investasi di bidang pendidikan akan menghasilkan masyarakat yang terdidik (*well-educated people*) yang pada gilirannya mereka akan dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Norris, 2001; Roger, 1995).

Selain itu, kondisi politik yang otoriter dan represif juga memungkinkan munculnya ketimpangan digital. Umumnya, suatu pemerintahan diktator berupaya membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi dengan cara menekan penggunaan internet di kalangan masyarakat. Pembatasan ini diharapkan dapat meningkatkan hegemoni pemerintah dan menghambat munculnya aktor-aktor politik baru yang dapat mengancam keberadaan rezim politik yang sedang berkuasa (Milner, 2006; Norris, 2001).

### **Kebijakan Teknologi yang Inovatif dan Inklusif**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa fenomena ketimpangan digital merupakan fenomena sosial yang terkait dengan aspek sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat ketimpangan digital, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan intervensi sosial dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dan *civil society*. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan dapat memunculkan kebijakan teknologi yang inovatif dan inklusif.

Kebijakan teknologi di sini dapat dipahami sebagai upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penyediaan dan penggunaan internet. Dengan demikian, kebijakan teknologi tidak terbatas pada aspek teknologi saja tetapi juga meliputi kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang juga berpengaruh terhadap ketimpangan digital, seperti kebijakan pendidikan, literasi, kesejahteraan individu, dan kebijakan lainnya (Chary & Aikins, 2010).

Kebijakan teknologi dituntut tidak hanya inovatif tetapi juga harus bersifat inklusif, yakni merefleksikan kebutuhan semua segmen masyarakat, yang tidak membedakan atas dasar gender, umur, status sosial, ras, serta ramah terhadap kelompok difabel. Berdasarkan beberapa studi, ada beberapa area yang dapat menjadi fokus kebijakan dalam rangka menjembatani ketimpangan digital, yakni kebijakan pendidikan, literasi, akses internet yang mudah dan terjangkau, dan pemberian layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memfasilitasi individu untuk belajar cepat menggunakan internet.

Kebijakan sosial untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mendorong peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi internet (Hoffman & Novak, 1998). Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menerima informasi, memungkinkan seseorang untuk mampu mengembangkan pengetahuan dan memaksimalkan kesempatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Berbagai kemampuan dan keterampilan yang dihasilkan dari investasi pendidikan tentu saja sangat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan digital (Baghchi, 2005; Chinn & Fairlie, 2007).



Sementara kebijakan di bidang pendidikan merupakan kebijakan berjangka panjang maka juga diperlukan kebijakan yang bersifat jangka pendek seperti kebijakan pemanfaatan internet bagi kelompok yang mengalami hambatan linguistik dan literasi. Salah satu contoh adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah India dengan mengembangkan dan meluncurkan “Simple Computer” (SIMPUTER) yang portabel di mana teknologi ini dapat mengonversi teks menjadi ucapan dalam berbagai bahasa lokal dan juga bahasa Inggris. Alat Simputer tersebut digunakan oleh para nelayan di teluk Bengal India untuk mengetahui kondisi cuaca (Meall, 2002).

Kebijakan berdampak langsung lainnya yang dapat didorong adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk wilayah-wilayah yang terpencil, tertinggal, dan terluar. Salah satu contoh adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses broadband (pitalebar). Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar (broadband) yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode lima tahun (2014 – 2019). Program RPI ini masuk dalam salah satu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Program RPI memiliki target untuk membangun prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perkotaan hingga persebarannya mencapai 30% dari populasi, dan 71% di rumah tangga dengan akses kecepatan mencapai 20 Mbps. Sedangkan untuk wilayah pedesaan program RPI menargetkan bisa menyebar hingga 6% populasi dan 49% rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps. Tak sampai situ saja, infrastruktur dan dukungan prasarana akses bergerak pitalebar (mobile broadband) juga digenjut pemerintah melalui program ini. Ditargetkan, jaringan mobile broadband bisa mencapai seluruh populasi di perkotaan dan 52% populasi di pedesaan dengan masing-masing bisa mengakses hingga kecepatan 1Mbps (Priambada, 2017).

Selain itu, kebijakan lainnya yang perlu didorong adalah pemanfaatan internet yang bersifat publik (konteks sosial) dengan memberikan layanan *e-governance*. Layanan *e-governance* terbukti efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan publik (James, 2001). Layanan *e-governance* juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif (Wilhem, 2004). Dengan demikian, layanan *e-governance* secara langsung maupun tidak langsung

mendorong masyarakat untuk belajar memanfaatkan teknologi internet sehingga pada gilirannya dapat menurunkan ketimpangan digital dalam masyarakat. Pada konteks ini, politik dan kultur dapat memainkan peran bersama dalam meningkatkan penggunaan internet.

## Penutup

Tulisan ini bermaksud menyajikan fakta bahwa ketimpangan digital bukan merupakan ilusi semata. Data tentang negara-negara pengguna internet di dunia menunjukkan bahwa ketimpangan digital lebih rentan terjadi di negara-negara berkembang. Untuk memahami akar masalah terjadinya ketimpangan digital di suatu negara atau masyarakat maka kita harus memahami bagaimana konteks sosial, ekonomi, politik dan kultural negara tersebut. Dengan demikian, ketimpangan digital tidak bisa dikategorikan hanya sebagai masalah penggunaan teknologi internet semata melainkan meliputi kompleksitas masalah sosial dalam suatu masyarakat.

Untuk mengatasi ketimpangan digital diperlukan suatu terobosan kebijakan teknologi yang inovatif dan inklusif. Kebijakan teknologi ini tidak hanya memfokuskan pada luaran (*output*) jangka panjang seperti investasi di bidang pendidikan namun juga pada luaran (*output*) berjangka pendek, seperti kebijakan pemanfaatan internet yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, pembangunan infrastruktur fisik, dan pemberian layanan publik, seperti *e-governance*.

## Referensi

- Bagchi, K. (2005). Factors contributing to global digital divide: Some empirical results. *Journal of Global Information Technology Management*, 8(3), 47–65.
- Castells, M. (1996). *The rise of the network society*. Oxford, UK: Blackwell Publishers.
- Chadwick, A. (2006). *Internet politics, states, citizens, and new communication technologies*. New York: Oxford University Press.
- Chary, M., & Aikins, S. K. (2010). Policy as a Bridge across the Global Digital Divide. In E. Ferro, Y. K. Dwivedi, J. R. Gil-Garcia, & M. D. Williams (Eds.), *Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society* (1st ed.). Hershey USA: Information Science Reference.
- Chinn, M. D., & Fairlie, R. W. (2007). The determinants of the global digital divide: A cross-country analysis of computer and Internet penetration. *Oxford Economic Papers*, 59, 16–44. doi:10.1093/ oep/gpl024.
- Ferro, E., Dwivedi, Y. K., Gil-Garcia, J. R., & Williams, M. D. (2010). *Handbook of Research on Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society*. Hershey USA: Information Science Reference.
- Franda, M. (2002). *Launching into cyberspace: Internet development and politics in five world regions*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Hargittai, E. (1999). Weaving the western web: Explaining differences in Internet connectivity among OECD countries. *Telecommunications Policy*, 23(10-11), 701–718. doi:10.1016/S03085961(99)00050-6

- Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1998). Bridging the racial divide on the Internet. *Science*. New Series, 280(5362), 390–391.
- James, J. (2001). The global information infrastructure revisited. *Third World Quarterly*, 22(5), 813–822. doi:10.1080/01436590120084610.
- Meall, L. (2002). Business: The digital divide— eastern promise. *Accountancy*, 129(1303), 1–4.
- Milner, V. H. (2006). The digital divide: The role of political institutions in technology diffusion. *Comparative Political Studies*, 39(2), 176–179. doi:10.1177/0010414005282983
- Parthasarathy, B. (2006). The political economy of the Indian software industry. In G. Parayil (Ed.), *Political economy and information capitalism in India. Digital divide, development, and equity*. New York: Palgrave Macmillan.
- Priambada, A. (2017). Lima Kebijakan Pemerintah yang harus Diperhatikan dalam Mendukung Keterlibatan Digital UKM. Diakses pada 12 Oktober 2017 dari <https://dailysocial.id/post/kebijakan-pemerintah-keterlibatan-ukm>.
- Resnick, D. (1998). Politics on the Internet: The normalization of cyberspace. In C. Toulouse & W. T. Luke (Eds.), *The politics of cyberspace*. New York: Routledge.
- Rogers, M. E. (1995). Diffusion of innovation. New York: Free Press.
- Piliang, Y. A. (2012). Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sositologi*, 27(11).
- Selwyn, N., & Facer, K. (2010). Beyond Digital Divide: Toward an Agenda for Change. In E. Ferro, Y. K. Dwivedi, J. R. Gil-Garcia, & M. D. Williams (Eds.), *Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society* (1st ed.). Hershey USA: Information Science Reference.

- Van Dijk, J. (2005). *The deepening divide. Inequality in the information society*. London: Sage Publications.
- Wilhelm, A. G. (2004). *Toward an inclusive information society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Yu, L. (2006). Understanding information inequality: Making sense of the literature of the information and digital divides. *Journal of Librarianship and Information Science*, 38(4), 229–252. doi:10.1177/0961000606070600.